

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 3 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - **Nomor/Tahun:** 3 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Daerah (PERDA).
- 

#### 2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001** tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005** tentang Dana Perimbangan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012** tentang Hibah Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017** tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018** tentang Standar Pelayanan Minimal.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018** tentang Pinjaman Daerah.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024** tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023** tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024** tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

---

### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban APBD 2024 kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- **Komponen Laporan:** Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- **Realisasi Keuangan Pokok:**
  - **Pendapatan:** Rp. 1.181.160.284.371,39.
  - **Belanja:** Rp. 1.154.460.597.377,53.
  - **SILPA Akhir:** Rp. 3.170.306.322,93.

---

### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku sejak tanggal diundangkan pada 7 Agustus 2025.
- **Sifat:** Peraturan Pertanggungjawaban Tahunan.

---

### 5. Informasi Tambahan

- Perda ini memuat 20 jenis lampiran rincian keuangan dan aset yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).